

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Andriansyah. (2015). Administarsi Pemerintahan Daerah dalam Analisa, Jakarta:

Fisip Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama.

Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Djaenuri, A. (n.d.). Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah.

Huda, Ni'matul. (2015). Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi

Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi, Malang: Setara Press.

Irawan, N. (2018). Tata Kelola Pemerintahan Desa era UU Desa, Jakarta:

Pustaka Obor Indonesia.

Koesoemahatmadja, R. (1979). Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah

Di Indonesia, Bandung: Bina Cipta.

Kushandajani. (2016). Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Semarang :

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP.

Mamudji, S. S. (2004). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta: PT.

Grafindo Persada.

Mamudji, S. S. (2013). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

PDTT, K. (2015). Regulasi Baru, Desa baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa,

Jakarta: Kemendes PDTT.

Sinyo, H. S. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soemantri, S. (2014). *Otonomi Daerah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Suteki. dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 5) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 6) Peraturan Bupati Nomor 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015

D. Jurnal

Aji, I. (2017). *Undang-Undang Desa sebagai Legitimasi Desa (Desa dalam Hukum KetatanegaraanIndonesia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 1(1).*

Bulan Berlinda Anjany, I. A. (2019). *Proses Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, Diponegoro Law Journal, 8 (3).*

Diamantina, A. (2016). *UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Masalah - Masalah Hukum, 45(1).*

Faturahman, B. M. (2018). *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa, Jurnal Sospol, 4(1).*

Haryanti, A. (2012). *Sistem Pemerintahan Daerah. Tangerang selatan: Umpam Press.*

Hasjimzoem, Y. (2014). *Dinamika Hukum Pemerinyahan Desa, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3).*